



KOMINFO

Peran Strategis Tata Kelola TIK Dalam Mewujudkan Organisasi yang Adaptif dan Agile

Dra. Mariam F Barata. MI.Kom

Direktur Tata Kelola Aptika

PENGERTIAN **Tata Kelola TIK**

Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan TIK dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan institusi, dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan TIK, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya TI dan mengelola resiko-resiko terkait TIK.

Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi bukan bidang yang terpisah dari pengelolaan pemerintahan, melainkan merupakan komponen pengelolaan pemerintahan secara keseluruhan, dengan tanggung jawab utama sebagai berikut:

- 1 Memastikan kepentingan *stakeholder diikutsertakan* dalam penyusunan kebijakan.
- 2 Memberikan arahan kepada proses yang menerapkan strategi kebijakan.
- 3 Memastikan proses tersebut menghasilkan keluaran yang terukur.
- 4 Memastikan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh dan mengukurnya.
- 5 Memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

DASAR HUKUM TATA KELOLA TIK

Sebelumnya untuk tata Kelola TIK diatur dalam PERMEN Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional . Panduan ini merupakan standar tata kelola yang resmi yang bisa dijadikan acuan seluruh instansi pemerintah di semua *level*, yakni kementerian atau LPND di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun pada tahun 2018 Permen tersebut dicabut.

- Saat ini dasar hukum yang digunakan untuk Tata Kelola TIK :
 - UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU ITE
 - UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja
 - PP 71 tahun 2019 Tentang PSTE
 - PP 80 tahun 2019 tentang PMSE
 - PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
 - Pepres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE
- Dengan mengacu pada peraturan tersebut, saat ini sedang disusun beberapa peraturan Menteri Kominfo sebagai petunjuk pelaksanaan.

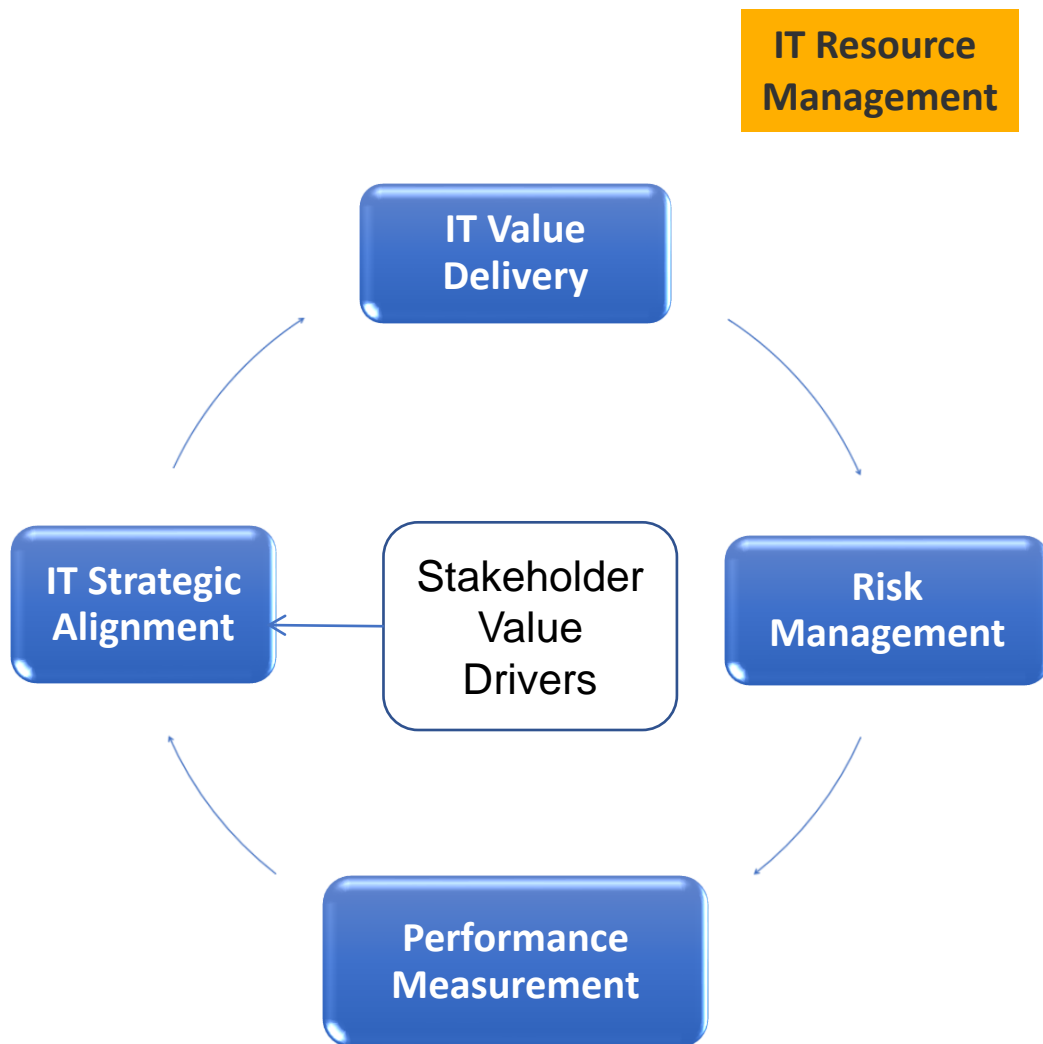
MENGAPA BUTUH **Tata Kelola TIK**

- ◆ Konsep “*IT governance*” muncul mulai akhir tahun 1990an
- ◆ Ketergantungan kepada TIK tidak begitu terasa manakala TIK hanya sebatas sebagai alat efisiensi → Tata-kelola TIK diabaikan
- ◆ Saat layanan & masa depan pemerintah sangat **tergantungan pada informasi & pengetahuan (*knowledge-based economy*)** → **ketergantungan kepada TIK sangat tinggi** → Tata-kelola TIK mutlak diperlukan!

Di lingkungan yang sudah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tata kelola TIK menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan ekspektasi dan realitas seringkali tidak sesuai. Pihak *shareholder Pemerintah selalu berharap agar Pemerintah dapat :*

- 1 Memberikan solusi TIK dengan kualitas layanan yang bagus, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran.
- 2 Menguasai dan menggunakan TIK untuk seluruh layanannya.
- 3 Menerapkan TIK untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas sambil menangani risiko TIK.

AREA FOKUS **Tata Kelola TIK**



◆ **Strategic Alignment**

Memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan TI dengan cara menetapkan, memelihara, serta menyesuaikan operasional TI dengan operasional organisasi.

◆ **IT Value delivery**

Fokus dengan melaksanakan proses TI agar supaya proses tersebut sesuai dengan siklusnya, mulai dari menjalankan rencana, memastikan TI dapat memberikan manfaat yang diharapkan, mengoptimalkan penggunaan biaya sehingga pada akhirnya TI dapat mencapai hasil yang diinginkan

◆ **Risk management**

Untuk melaksanakan pengelolaan terhadap risiko, dibutuhkan kesadaran anggota organisasi dalam memahami adanya risiko, kebutuhan organisasi, dan risiko – risiko signifikan yang dapat terjadi, serta menanamkan tanggung jawab dalam mengelola risiko yang ada di organisasi.

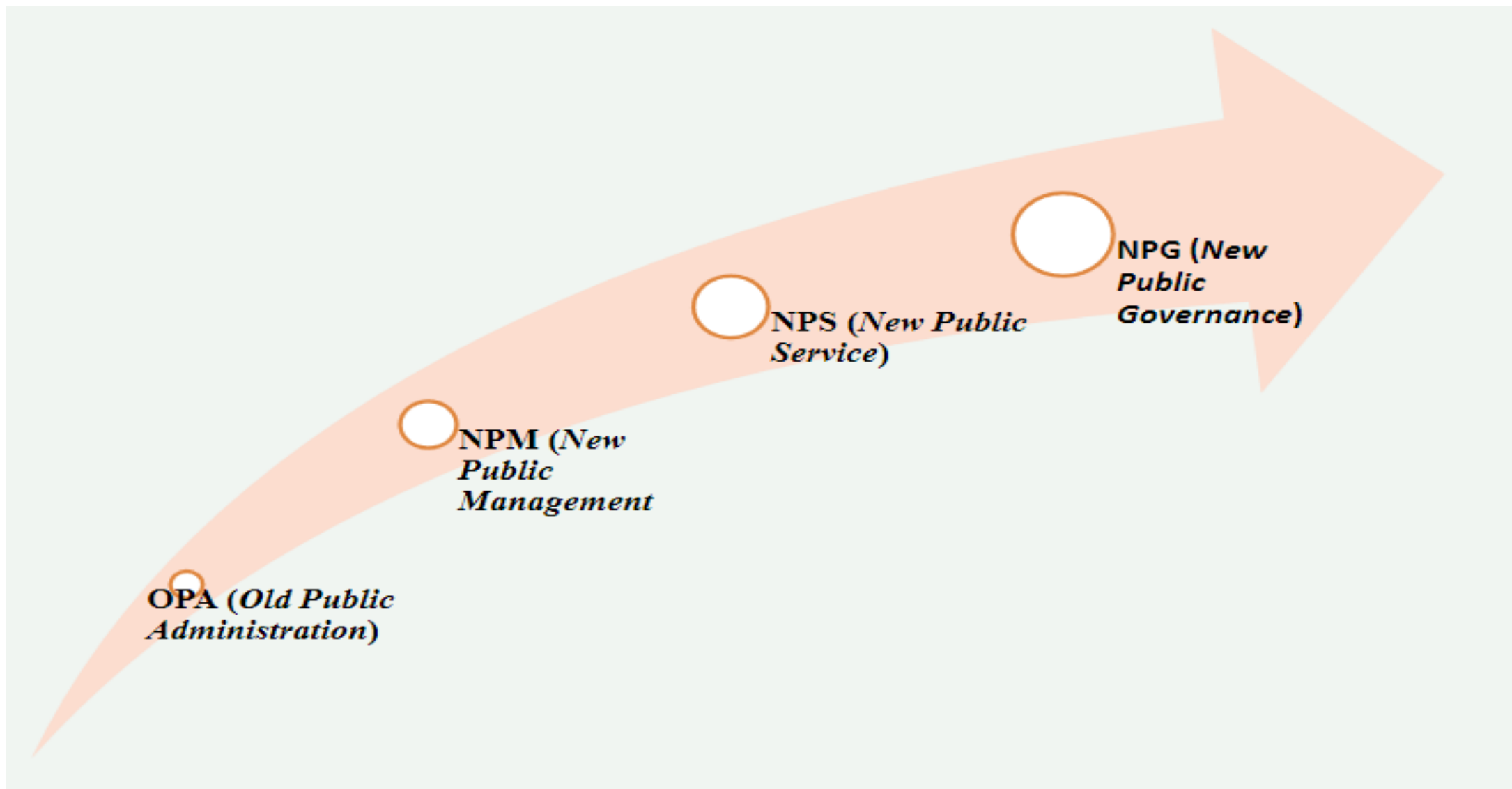
◆ **Performance measurement**

Mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana, pelaksanaan proyek, pemanfaatan sumber daya, kinerja poses, penyampaian layanan sampai dengan pencapaian hasil TI

◆ **Resource management**

Fokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya TI, yang terdiri dari aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia

PARADIGMA BESAR PELAYANAN PUBLIK



PARADIGMA BESAR PELAYANAN PUBLIK

	Old Public Administration	New Public Management	New Public Service
Struktur organisasi	Birokratis, otoritas hierarkhis ke dalam, kontrol dan regulasi ke masyarakat	Layanan publik yg terdesentralisasi, tetapi kendali utama tetap di tangan pemerintah	Kolaboratif, kepemimpinan bersama secara internal dan eksternal
Motivasi	Gaji dan tunjangan serta perlindungan sbg pegawai negeri	Semangan wirausaha dan keinginan ideologis mengurangi ukuran pemerintah	Pelayanan masyarakat,, keingin memberikan kontribusi kepada masyarakat
Pendekatan akuntabilitas	Secara hierarkhis administrator bertanggung jawab kepada pejabat politik	Market driven, responsif kepada customers/citizens	Akuntabilitas hukum, nilai masyarakat, norma politik, profesional dan kepentingan masyarakat

NEW PUBLIC GOVERNANCE

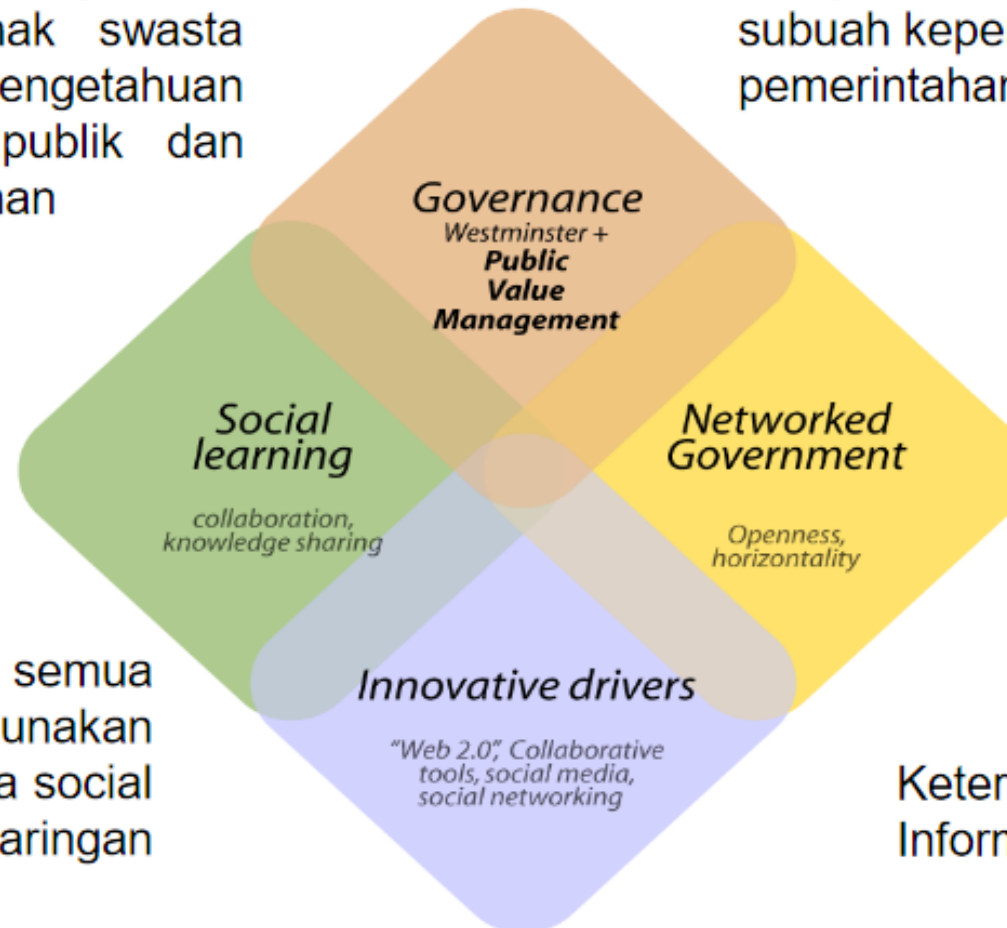
Tata Kelola Pemerintahan publik dapat menggantikan apa saja yang dahulu tidak dapat digantikan melalui:

- 1 Ikut terlibat dalam pembentukan pembuat kebijakan, yang biasanya hanya dilakukan oleh Legislator, eksekutif terpilih, petugas peradilan, dan administrator.
- 2 Tujuannya adalah agar apa yang dihasilkan menjadi baru suatu yang benar-benar baru dan bermanfaat, setidaknya lembaga-Lembaga dapat stabil. (Osborne, 2010)

PEMERINTAH MEMBUTUHKAN MODEL **TATA KELOLA BARU** (New Public Governance)

Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta dalam berbagi pengetahuan tentang pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

Pelayanan Publik menjadi sebuah kepentingan bagi pemerintahan.



Untuk tercapainya semua itu, alat yang digunakan adalah bisa berupa social media, dan jaringan computer (Interet).

Keterbukaan Informasi.

PENGERTIAN Agile Governance

Agile Governance diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah (Holmqvist dan Pessi, 2006; Ngai et al., 2011; Bradley et al., 2012)

Agile Governance juga diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk dapat melakukan efisiensi biaya, serta meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam mengeksploitasi peluang untuk menjadikan tindakan-tindakan inovatif dan kompetitif (Huang et al., 2014; Liang et al., 2017; Queiroz et al., 2018)

Meskipun pada awalnya terminology agile ini dipakai oleh pengembang software untuk merujuk pada metode dan praktik di bidang teknologi dan pelayanan digital yang lebih tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, dalam perkembangannya logika agile juga diterapkan untuk meningkatkan struktur, proses, perilaku, dan budaya birokrasi public (Cooke, 2012)

PENGERTIAN Agile Governance

Lebih lanjut Luna, Kruchten, dan Moura (2015) menjabarkan agile governance kedalam enam prinsip yakni:

- 1 Good enough governance:** tingkat tata kelola harus selalu disesuaikan dengan konteks organisasi. *Misalnya dengan menetapkan visi misi, renstra, dan renja atau seperti saat ini Kominfo juga sedang Menyusun "Peta Jalan Indonesia Digital"*
- 2 Business-driven:** Kepentingan bisnis harus menjadi alasan untuk setiap keputusan dan tindakan.
- 3 Human focused:** masyarakat harus dihargai dan diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan. *Misalnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan*
- 4 Based on quick wins:** keberhasilan yang diraih secara cepat harus dirayakan dan dijadikan motivasi untuk lebih mendapatkan banyak rangsangan dan hasil. *Misalnya dengan menerapkan reward and punishment*
- 5 Systematic and Adaptive approach:** team harus dapat mengembangkan kemampuan intrinsik untuk dapat merespon perubahan secara cepat dan sistematis. *Misalnya dengan memberikan pelatihan kepada SDM*
- 6 Simple design and continuous refinement:** team harus mampu memberikan hasil yang cepat dan selalu meningkat.

? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita dapat menciptakan birokrasi publik yang adaptif dan agile

Pertama, birokrasi publik perlu merumuskan value proposition yang akan diwujudkan dengan metode agile dan melakukan agility shift, yaitu mengubah cara kerja birokrasi gaya lama ke cara kerja yang baru yang lebih terbuka, adaptif, dan responsif (Dhir & Sushil, 2018)

Kedua, karakter pemimpin haruslah siap menghadapi lingkungan yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi dengan pendekatan yang proaktif dan tidak alergi terhadap segala bentuk perubahan (Bradley, et.al., 2015; Kitchin, 2014a)

Ketiga, melakukan pendekatan citizen-centric. Warga negara (citizen) memegang peranan yang amat penting dalam kebijakan publik yang agile, Penerapan *citizen-centric approach* dalam penyusunan standar pelayanan harus bekerjasama dengan para pemangku kepentingan, termasuk didalamnya adalah menyusun strategi untuk menguasai perubahan dan ketidakpastian (Shah & Stephens, 2005)

Keempat, investasi sumber daya manusia untuk menguasai bidang ilmu-ilmu baru. Dengan perkembangan ICT, birokrasi publik harus memahami bahwa pelanggannya telah berubah, baik itu perilaku maupun ekspektasinya pada layanan publik. Untuk itu, birokrasi publik yang agile perlu melakukan investasi sumber daya manusia untuk memiliki kemampuan digital, seperti artificial intelligence, machine learning, ataupun predictive algorithm

Kelima, perbaikan sarana dan prasarana TIK khususnya di wilayah timur Indonesia dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian maupun penggunaan TIK dalam tata kelola pemerintahan.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia



TERIMA KASIH